PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 16 April 2009 Halaman: 14

HARIAN JOGJA/DESI SURYANTO

RENCANA PENATAAN ALKID: Sejumlah pedagang kaki lima menjajakan beragam mainan dan makanan di sisi barat Alun-Alun Selatan Jogja, Rabu (15/4). Pemerintahan Kota (Pemkot) Jogja berencana untuk melakukan penataan atas salah satu ikon pariwisata kota Jogja tersebut.

Guna penataan, PKL Alkid didata

Oleh Yuspita Anjar Palupi
HARIAN JOGJA

KRATON: Rencana penataan Alun-alun Kidul (Alkid) sebagai rangkaian objek kawasan wisata di Jogja bagian selatan kian matang.

Dijadwalkan Senin (20/4) mendatang, para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar Alkid akan segera di data oleh pemerintah kota (pemkot) dan pihak kecamatan setempat.

"Pendataan akan dilakukan kepada PKL yang ada di sekitar Alkid, Jalan Magangan, Jalan Rotowijayan," ungkap staf Trantib Kecamatan Kraton, Ripto kepada *Harian Jogja*, Rabu (15/4).

Ia menuturkan penataan Alkid oleh pemkot dan kecamatan setempat lebih menuju pada penataan PKL makanan dan minuman baik yang berjualan pagi maupun sore dan malam hari. Karena dari sekitar 150-an PKL yang saat ini berada di Alkid tidak satu pun yang mengantongi izin restribusi.

"Saat ini yang baru mengantongi izin pajak, hanya pedagang yang ada di sekitar Ngasem dan Wijilan. Yang jumlahnya baru sekitar 12 PKL," kata dia.

PKL itu meliputi pedagang gudeg, angkringan dan warung-warung kecil yang ada di sana. Dengan besar setoran pajak yang terbilang minim yakni kisaran Rp5.000 hingga Rp25.000 per bulan.

"Kalau pedagang gudeg rata-rata setoran pajaknya Rp20.000-Rp25.000. Sedangkan angkringan rata-rata Rp5.000-Rp10.000 per bulan," tuturnya.

Dikatakan, usai pendataan PKL tersebut, pemkot melalui pemerintah kecamatan rencananya akan mengenakan restribusi kebersihan. Dengan besaran yang hingga saat ini belum dipastikan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jogja, Purwanto menerangkan semenjak Januari pasca perombakan pejabat di lingkungan Kota Jogja, ada pelimpahan wewenang penarikan restribusi kebersihan PKL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sekarang berganti nama Badan Lingkungan Hidup (BLH) kepada pemerintah kecamatan.

"Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, kecamatan berwenang untuk mengelola restribusi tersebut," kata dia.

Sementara itu, pedagang nasi uduk di Alkid, Wagirah menuturkan pihaknya belum mendengar adanya rencana pendataan PKL yang ada di Alkid. Ia berharap penataan PKL yang akan dilakukan pada akhirnya nanti tidak membebankan pedagang.

"Ditarik restribusi ya boleh, tapi jangan terlalu mahal," kata dia.

Yogyakarta, 16 April 09

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Kecamatan/Kemantren Kraton	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005